

Peranan Pancasila dalam melawan politik identitas

Dini Anggita Putri

Program Studi Psikologi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
email: danggitapp@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila; politik; politik identitas; persatuan.

Keywords:

Pancasila; politics; identity politics; unity.

ABSTRAK

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang berarti segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur di dalamnya, termasuk juga dalam aspek politik. Namun, masih juga banyak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kehidupan berpolitik, seperti adanya politik identitas yang mengancam kesatuan dan persatuan NKRI. Artikel ini ditulis menggunakan metode studi pustaka dengan memanfaatkan sejumlah jurnal, artikel e-book yang didapatkan dari internet. Penulisan artikel ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bahayanya politik identitas yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Pancasila sebagai dasar negara telah mengajarkan untuk toleransi dan bagaimana menghargai sesama.

ABSTRACT

Pancasila is the basis of the Indonesian state, which means that all aspects of the life of the nation and state are regulated in it, including in the political aspect. However, there are still many deviations in carrying out political life, such as the existence of identity politics that threaten the unity and integrity of the Republic of Indonesia. This article is written using the literature study method by utilizing a number of journals, articles, e-books obtained from the internet. The writing of this article aims to make readers aware of the dangers of identity politics that can break unity and integrity. Pancasila as the basis of the state has taught tolerance and how to respect others.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, serta dasar-dasar hukum dari negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang digunakan sebagai dasar-dasar tatanan hidup bangsa, dari mulai dasar peraturan yang digunakan, hingga dasar-dasar kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini sendiri dikarenakan Pancasila sendiri diambil dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri yang telah ada sejak Indonesia belum didirikan. Hal ini selaras dengan pendapat Sutan, S. Z (2006) yang mengatakan “Pancasila adalah suatu pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia yang nilainya sudah ada sebelum secara yuridis Indonesia terbentuk sebagai negara”.

Pancasila memiliki 5 nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Salah satu fungsi dari nilai-nilai tersebut adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dimana persatuan dan kesatuan adalah salah satu unsur terpenting yang dibutuhkan oleh setiap negara yang merdeka. Tanpa nilai persatuan negara akan terpecah belah. Terlebih lagi Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki beragam agama, suku, ras, hingga kebudayaan, sedikit perselisihan dapat mengakibatkan perpecahan yang fatal. Namun sejarah membuktikan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

jika Indonesia adalah negara yang mampu hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Indonesia yang sejak zaman dahulu telah memiliki banyak perbedaan dari agama, suku, adat, dan budaya, namun hal tersebut tetap bisa dilalui dengan damai.

Bangsa yang besar adalah sebuah bangsa yang mampu bertahan dengan ideologinya dengan cara menjaga persatuan di dalamnya secara utuh. Nilai persatuan adalah sebuah obat mujarab dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang berpersatuan (Hanafi, 2018).

Persatuan dan kesatuan Indonesia yang damai pernah diuji beberapa kali, terutama pada tahun-tahun politik, tahun-tahun menuju pemilihan pemimpin. Pada masa ini warga

Indonesia akan banyak terbelah menjadi berbagai kubu, demi mendukung sang calon pemimpin pilihannya, tahun ini merupakan tahun yang sangat rawan akan adanya perpecahan. Seperti terjadinya politik identitas pada tahun 2017 yang mencoreng kedamaian persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Politik identitas berakibat buruk pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati. Politik yang seharusnya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi malah melewati batas-batasnya. Pada masa inilah eksistensi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa ditanyakan eksitensinya. padahal sudah jelas adanya jika Pancasila telah mengajarkan toleransi, harmonisasi, dan juga sikap saling menghargai dalam berpendapat.

Pembahasan

Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti prinsip atau asas. Hal ini berartikan bahwa Pancasila adalah dasar yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Pancasila memiliki lima nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Dalam nilai-nilai tersebut mencangkup banyak bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang politik. Secara umum perwujudan Pancasila di dalam bidang politik mencangkup beberapa hal, yaitu lembaga negara, hukum, hak asasi, dan juga demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia (Dian Paramita, 2017). Adapun contoh perwujudan nilai-nilai tersebut antara lain

1. Lembaga Negara

Perwujudan Pancasila pada bidang politik mengikuti perkembangan zaman. Seperti perubahan kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga negara lain. Hal ini merupakan perwujudan nilai demokrasi dan keadilan Pancasila. Perubahan ini memiliki tujuan untuk menyetarakan kedudukan lembaga negara, agar lembaga

negara dapat saling mengoreksi untuk menyempurnakan kinerja dan dalam usaha memajukan Indonesia.

2. Hukum

Perwujudan Pancasila dalam bidang hukum adalah terciptanya undang-undang yang digunakan sebagai pedoman berpolitik. Salah satu contohnya adalah UUD No. 7 tahun 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan salah satu hal penting yang banyak disoroti, karena tiap-tiap manusia memiliki hak asasinya yang wajib untuk dipenuhi, maka dari itu negara turut menjamin pemberian hak asasi manusia, seperti yang terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 yang terdiri dari BAB I – XI dengan total 106 pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia.

4. Pengembangan Demokrasi Pancasila

Merujuk sistem politik Indonesia yang berbentuk demokrasi Pancasila, sudah jelas adanya bahwa sistem politik Indonesia berlandaskan Pancasila. Saat ini pengambilan keputusan politik Indonesia mengedepankan suara rakyat, salah satu contohnya adalah pemilihan presiden yang sekarang diputuskan oleh suara rakyat, bukan lagi melalui keputusan MPR. Hal ini seperti yang terdapat pada Pancasila sila ke-4.

Namun, harmonisme politik Indonesia masih sering kali mengalami guncangan, terlebih pada masa-masa tahun politik, dimana rakyat Indonesia banyak terbelah menjadi berbagai kubu yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan mereka. Ditambah dengan munculnya politik identitas yang memperburuk keadaan, karena sudah jelas adanya bahwa politik identitas menyalahi sila-sila Pancasila.

Politik identitas menurut Liliana Mason dan Nicholas T. Davis adalah partisipasi individu-individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu. Dalam hal ini jelas adanya bahwa politik identitas digunakan untuk menonjolkan suatu kelompok demi mendapatkan tujuannya yaitu sebuah pengakuan dan legitimasi, seperti yang dijelaskan oleh Kauffman. Politik identitas juga merupakan suatu penggolongan yang bersinggungan dengan SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan) dikarenakan penggolongan yang mereka tonjolkan biasanya berdasarkan hal tersebut. Politik identitas tidak sama dengan “identitas politik.” Karena identitas politik cenderung pada identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang yang berbeda dengan yang lain. Sedangkan “politik identitas” merupakan upaya yang dilakukan terhadap kepemilikan identitas untuk membangun sebuah perbedaan (“kami” dan “bukan kami”) yang biasanya atas dasar ras, etnik, budaya ataupun bahkan agama teretantu (Andriyani, 2019). Dalam konteks apapun, penggolongan terhadap segala sesuatu itu dapat dilakukan, termasuk penggolongan identitas secara politik (R.H. Nugroho, 2018).

Politik identitas pernah terjadi di Indonesia beberapa kali, seperti yang terjadi pada tahun 2017 dimana merupakan tahun politik terpanas, dimana terkenal dengan terjadinya politik identitas oleh umat islam. Hal ini disebabkan oleh penistaan Al-Quran Q.S. Al-Maidah [5]: 51 oleh salah satu paslon, kejadian ini membangkitkan kekuatan umat islam hingga menimbulkan aksi unjuk rasa 212 di Jakarta. Aksi yang dilakukan umat

islam ini menunjukan adanya politik identitas yang dilakukan oleh umat islam. Sebenarnya hal ini dilakukan oleh umat islam bukan semata-mata untuk membela umat islam yang ada di Jakarta, tetapi juga yang diluar Jakarta dan juga seluruh dunia. Namun adanya peristiwa ini dalam tahun politik memberikan kesan politik identitas yang sangat kuat pada umat islam, karena hal ini membangun kekuatan politik islam oleh umat islam di Indonesia.

Selain hal tersebut pada Pilkada tahun 2017 juga terjadi politik odentitas yang mengatas nama kan ras, warga pribumi melakukan penolakan terhadap non-pribumi. Dimana paslon Cagub saat itu bukan keturunan asli keturunan pribumi. Pemisahan diri warga pribumi diambil untuk upaya penjatuhan kelompok lain. Hal tersebut hingga memunculkan tag line yang berisi penolakan terhadap paslon yang maju. Tag line tersebut bertuliskan "Asal jangan Ahok" atau "Asal bukan Ahok." Maka dari itu pilkada pada tahun 2017 dikenal dengan masa pilkada terpanas karen kental akan politik identitas yang menyinggung aspek agama dan juga ras dan etnis. Politik identitas sebenarnya dapat memberikan kekuatan besar oleh musuh, karena suara akan tervokus ke dalam satu sisi. Hal ini dibuktikan pada pilkada dengan kemenangan yang didapatkan oleh lawan yaitu Anies-Sandi yang berhasil terpilih menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 2017. Salah satu dukungan besarnya didapatkan dari adanya politik identitas yang dilakukan oleh umat islam yang tercipta secara alamiyah akibat dari peristiwa tersebut. Politik identitas adalah salah satu cara jitu yang digunakan para politisi untuk mendapat dukungan besar dengan memainkan ras, suku, hingga agama, bahkan politik identitas yang berlandaskan agama sangat mudah dimanfaatkan untuk menarik banyak dukungan, mengingat Indonesia sebagai negara beragama. Banyak politik identitas terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi radikal Indonesia yang berdasarkan agama.

Organisasi-organisasi tersebut melakukan aksi politik identitas dengan cara-cara ekstrem, salah satu yang dilakukannya adalah bom bunuh diri. Mereka ini semua anti-Panca sila, anti-demokrasi, dananti-pluralisme (R. H. Nugroho, 2018). Hal ini adalah salah satu tantangan yang cukup serius yang mengancang kesatuan dan persatuan, serta keutuhan NKRI.

Politik identitas sudah pernah menghancurkan persatuan dan kesatuan di negara lain. Hal ini dapat kita lihat dari pecahnya Civil War di Amerika Serikat, konflik pribumi dan non-pribumi di Semananjung Malaya, hingga pecahnya negara Yugoslavia, dan perang Suriah yang awalnya disebabkan oleh politik identitas. Kita dapat belajar dari bagaimana negara-negara tersebut menjadi terpecah belah akibat dari adanya politik identitas.

Adanya politik identitas sudah dengan jelas melanggar sila-sila Pancasila, terutama sila persatuan dan juga sila kerakyatan dan demokrasi, yang merupakan sila ke-3 dan ke-4 Pancasila. Jelas dalam sila tersebut mengajarkan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu dan menghargai sesama. Jika kita melanggar Pancasila yang merupakan jati diri dan ideologi bangsa Indonesia sama seperti kita mempermalukan diri di depan

bangsa lain, karena sebagai bangsa kita gagal untuk menjalankan jati diri bangsa dengan baik.

Pancasila mengakui adanya pluralitas, keragaman, dan juga kekhasan tiap golongan. Beberapa prinsip pancasila yang dapat digunakan untuk menyelesaikan politik identitas antara lain, pertama, Pancasila mengakui adanya pluralitas. Pluralitas harus mengakui adanya kesatuan dan tidak boleh menghancurkan kesatuan, dan sebaliknya kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang dimiliki oleh Indonesia. Kedua, nilai-nilai dalam Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nilai-nilai tersebut digali untuk kembali mengingatkan bangsa Indonesia akan sikap toleransi yang harus dimiliki setiap warga negara. Politik identitas hanya akan kembali menghidupkan penggolongan atas dasar SARA yang hanya akan menimbulkan perpecahan.

Politik identitas seharusnya dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, atau politik kenegaraan yang mengedepankan asas-asas Pancasila dan menghapuskan egoisme kelompok yang merupakan latar dari munculnya politik identitas. Karena pada hakikatnya Indonesia adalah miliki bersama tanpa adanya dominasi oleh satu kelompok yang menguasai negara.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila merupakan dasar negara yang digunakan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang politik. Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan, karena hal tersebut merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki oleh suatu negara yang merdeka. Namun, masih banyak warga Indonesia yang gagal dalam menjalankan sila-sila Pancasila. Salah satunya adalah dengan munculnya politik identitas yang jelas mengagungkan satu identitas dari suatu kelompok, hal ini melanggar sila ke-3 Pancasila “persatuan Indonesia.”

Padahal sudah jelas jika Pancasila mengajarkan toleransi, mengajarkan bagaimana cara menghargai satu sama lain, dan mengajarkan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Politik identitas sudah jelas melanggar hal tersebut. Tanpa kesatuan dan persatuan Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang besar. Politik identitas hanya akan memecah belah kesatuan dan persatuan yang telah dimiliki Indonesia. Sudah selayaknya kita sebagai warga negara yang baik untuk bisa saling menghargai pendapat satu sama lain, meskipun sangat bertolak belakang dengan apa yang kita yakini seperti apa yang telah diajarkan oleh Pancasila.

Daftar Pustaka

- Habibi, M. (2017). Identity Politics in Indonesia. *Universitas Mulawarman, Samarinda*, 1(March), 1–23. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887>
- Muthohirin, N. (2019). Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>

- Nugroho, R. H. (2018). Peranan Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Menanggulangi Politik Identitas. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1), 96–106. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2434>
- Oktaviani, Tari. Naifular, N. N. (2023). *Apa Itu Politik Identitas dan Contohnya*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/14/01150031/apa-itu-politik-identitas-dan-contohnya>
- Paramita, D. (2017). *11 Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Politik Dalam Perkembangannya*. <https://guruppkn.com/perwujudan-nilai-pancasila-bidang-politik>